

TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Syifa Jouhairiah Mahedar
NPP 31.0986

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email : syifajmahedar@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Cynthia Febri Sri Indarti, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research aims to understand and describe how Collaborative Governance in Waste Management is implemented in Ambon City, Maluku Province, and to identify factors hindering Collaborative Governance activities in Waste Management in Ambon City, Maluku Province.* **Purpose:** *The purpose of this study was to identify Collaborative Governance in Waste Management in Ambon City, Maluku Province..* **Method:** *This research is a qualitative research with a descriptive method. The data sources used are person, place and also paper. Data collection techniques are carried out by interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques were obtained using coding techniques.* **Result :** *The results of the research concluded that waste management in Ambon City, particularly in Sirimau District, is implemented by applying the concept of collaboration, which includes raising awareness of the importance of waste management as the initial stage of collaboration, by creating memorandums of understanding with stakeholders. Effective collaboration has been established between the Environmental and Waste Management Department, the Sirimau Subdistrict Head, Community Self-Reliance Groups, Waste Banks, Waste Collectors, and the general public. The second stage involves building waste management institutions by forming Community Self-Reliance Groups to manage waste. The program is consistently run through various cleanliness competition activities.* **Conclusion:** *The conclusion is that forming Community Self-Reliance Groups to manage waste and consistently running the program through various cleanliness competition activities are essential steps. Developing a clear roadmap with stages and targets to be achieved in the short, medium, and long term is also crucial. The subdistrict head, as the regional leader, plays the role of a driving force who understands the substance of waste management and sets an example by directly engaging with the community to tackle waste together.*

Keywords: *Collaboration, Waste Management, Institutional, Stakeholder, Leadership*

ABSTRAK

Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku, mengetahui faktor yang menjadi penghambat kegiatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah

untuk melakukan identifikasi Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu *person*, *place* dan juga *paper*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh dengan menggunakan teknik coding. **Hasil:** Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan sampah di Kota Ambon khususnya di Kecamatan Sirimau dilaksanakan dengan menerapkan konsep kolaborasi yang meliputi: pembangunan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah sebagai awal tahap kolaborasi, dengan membuat nota kesepahaman dengan stakeholders. Kolaborasi telah terjalin dengan baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Camat Sirimau, Kelompok Swadaya Masyarakat, Bank Sampah, Pengepul sampah dan Masyarakat umum. Tahap kedua dengan membangun kelembagaan pengelolaan sampah. Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai pengelola sampah. Konsisten menjalankan program dengan melakukan berbagai kegiatan lomba kebersihan. **Kesimpulan:** Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai pengelola sampah. Konsisten menjalankan program dengan melakukan berbagai kegiatan lomba kebersihan. Melakukan road map yang jelas dengan tahapan-tahapan target yang harus dicapai, jangka pendek, menengah dan panjang. Camat sebagai pimpinan daerah, melakukan peran sebagai motor penggerak yang memahami substansi pengelolaan sampah, memberi contoh dengan terjun langsung di tengah masyarakat untuk menangani sampah bersama-sama.

Kata Kunci : Kolaborasi, Pengelolaan Sampah, Kelembagaan, Pemangku Kepentingan, Kepimpinan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan global memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Menurut Max Weber Konsep *government*, penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak menggunakan bentuk struktur birokrasi dalam pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. secara perlahan berkembang ke arah konsep *governance* maupun struktur birokrasi yang semakin efisien. Konsep *good governance* merupakan konsep pemerintahan yang menjadi hangat diperbincangkan di dunia selama 2 (dua) dekade terakhir. Isu *governance* di Indonesia mulai menjadi bahan perbincangan pada era reformasi 1998. *Governance* menjadi konsep yang dituntut untuk diterapkan sejalan dengan dinamika yang menuntut perubahan agar dapat menjalankan semua tugas, fungsi, dan peranan masing-masing disemua sektor birokrasi berupa sektor pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. *Governance* dianggap sebagai jawaban atas reformasi yang harus dijalankan oleh pemerintahan Indonesia seiring dengan penerapan kebijakan desentralisasi (Prasojo & Kurniawan, 2008).

Collaborative Governance merupakan respon dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang bersifat kompleks dibalik keterbatasan sumber daya dan efisiensi anggaran. *Collaborative Governance* dianggap sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan masalah

sosial yang sudah lama terjadi dan membawa dampak yang tidak baik, merumuskan rencana pembangunan daerah untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui kolaborasi antara pemangku kepentingan (Thomas dan perry, 2006) dalam Islamy (2018:3).

Permasalahan pada sampah merupakan masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Permasalahan sampah disebabkan oleh banyak faktor diantaranya peningkatan jumlah penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. dan kurangnya sarana prasarana yang digunakan dalam penanganan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan, dan asas ekonomi.

Berdasarkan Laporan Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 memperlihatkan keseluruhan produksi sampah domestik telah mencapai 67,8 juta ton. Data tersebut menyiratkan bahwa setiap harinya dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Dihasilkan sampah sebesar 185,753 ton atau setiap penduduk menghasilkan sekitar 0,68 kilogram sampah per hari. Pengelolaan sampah harus ditangani oleh banyak pihak untuk itu perlu kolaborasi dalam penyelesaiannya (Rizaty, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 Pasal 3 bahwa di Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah adalah pemerintah daerah dan diberikan pelimpahan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dan Persampahan dalam penanggulangan sampah tersebut. Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku adalah salah satu pusat perbelanjaan dan aktivitas ekonomi lainnya. Jumlah penduduk peningkatannya begitu tajam dikarenakan terjadi urabanisasi dari daerah – daerah penyanggah Kota Ambon, sehingga berdampak langsung kepada peningkatan jumlah timbulan sampah di setiap tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di berbagai lokasi kota terkhususnya daerah pesisir.

Seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi perkotaan, maka efeknya akan berdampak pada lingkungan perkotaan. Kebutuhan lingkungan perkotaan yang bersih dan tertata dengan baik merupakan elemen penting dalam kehidupan perkotaan yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat juga akan menyebabkan peningkatan timbulan sampah, Untuk mengatasi hal tersebut salah satunya adalah peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang efektif dan modern.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 menyatakan dengan jelas bahwa pengelolaan sampah harus menjadi komitmen pemerintahan serta dengan melibatkan berbagai pihak. Pengelolaan berbasis kolaborasi dengan melibatkan seluruh stakeholders. Terdiri dari masyarakat, LSM, pihak swasta, dan pemerintahan menjadi model ideal (Damhuri dan Padmi, 2010:25). Pengelolaan sampah berbasis kolaborasi akan menggerakkan seluruh stakeholders untuk bertanggung jawab secara kolektif dengan tujuan untuk menangani permasalahan sampah (Sufiyanti, 2011).

Pemerintah Kota Ambon sudah paham dan menerapkan pengelolaan sampah dengan konsep kolaborasi yang sudah terjalin sejak 2022 sampai sekarang. Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon yakni dengan pihak Multi Verse Optimizer Nederlands dalam pengelolaan sampah yaitu pengolahan daur ulang sampah.

Latar belakang kelembagaan pengelolaan sampah ini didorong oleh penanganan sampah yang belum optimal, keterbatasan pemerintah namun disisi lain terdapat potensi besar yang dimiliki masyarakat yang belum dimanfaatkan selama ini. Dampak pengelolaan sampah yang tidak optimal menyebabkan penurunan kualitas Kesehatan masyarakat, lingkungan, kenyamanan dan keindahan. Pengelolaan sampah yang buruk di pusat kota akan berdampak pada image Kota Ambon secara keseluruhan. Kolaborasi pengelolaan sampah baru pada tahap inisiasi dan sampai saat ini masih berproses. Tahap awal yang sedang dilakukan adalah pembentukan kelompok- kelompok swadaya masyarakat dan secara paralel dilakukan pemangunan kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama mengelola sampah. Kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama mengelola sampah pembangunan kolaborasi antara lembaga pemerintah, yaitu Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah- Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan- Bagian Kerjasama sebagai supporting sistem pendukung proses kolaborasi. Pembangunan kolaborasi juga dilakukan antara kecamatan-kelurahan juga untuk menjadi unsur-unsur penjamin kesuksesan proses kolaborasi yang menuntut semua aktor untuk bertanggungjawab, bergerak untuk mengelola bersama.

Program kolaborasi penanganan sampah yang telah dibentuk yaitu berdirinya Pabrik Daur Ulang Sampah di Kota Ambon dan juga berdirinya Bank Sampah di setiap Kecamatan.

Program kolaborasi penanganan sampah yaitu berdirinya Pabrik pengelolaan sampah yang didukung secara resmi oleh Pj Walikota Ambon. Proses kerjasama antara lembaga dan pemerintah diwujudkan dalam bentuk dukungan dari masing-masing lembaga pemerintah.

Kota Ambon sendiri selain dengan adanya Pabrik Daur Ulang Sampah, di beberapa Kecamatan di Kota Ambon telah dibentuk Bank Sampah yang dimana Bank Sampah ini bertujuan sebagai salah satu upaya masyarakat mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai.

Bank sampah di Kota Ambon sendiri diolah oleh pemerintah desa dan juga masyarakat Kota Ambon sendiri. Bank Sampah Kota Ambon sudah melakukan beberapa kerjasama dengan instansi dan juga perusahaan maupun lembaga pendidikan keagamaan, contohnya: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dan Persampahan Kota Ambon, Klasis Pulau Ambon serta Pesantren Hidayatullah (Green Molucass: 2022).

Sampah yang diangkut dari beberapa Bank sampah di Kota Ambon akan di Angkut dan dibawa ke Pabrik Daur Ulang sampah dan di proses sesuai prosedur 3R (reduce, reuse dan recycle) dan dikirim ke Surabaya untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan uraian permasalahan yang sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Jumlah produksi sampah di Kota Ambon semakin hari semakin bertambah volumenya, oleh karena itu Pemerintah Kota Ambon melakukan kolaborasi dengan beberapa *Stakeholders*. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Tata Kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku dimulai dari sumberdaya Manusia yang tidak mendukung atau tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah produksi sampah yang dihasilkan dan juga Sarana Prasarana yang tidak mendukung hal ini sering membuat sampah mengalami penumpukan.

Selain itu, masih sangat minim kesadaran dari masyarakat setempat dan juga masyarakat belum memahami pengelolaan sampah secara Holistic.

1.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ely Sulfianti (2011) dalam jurnal dengan judul Perencanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan. Penelitian ini menjelaskan mengenai konsep dan praktik perencanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah adapun metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dalam pengelolaan sampah dibutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Keberhasilan perencanaan kolaborasi pada pengelolaan lingkungan. Penerapan konsep kolaborasi dalam pengelolaan sampah juga tidak mustahil di terapkan, keterlibatan pemangku kepentingan diikat dalam proses kolaborasi dengan keberhasilan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dan perencanaan dalam melihat karakteristik masyarakat dan permasalahan yang ada. Persamaan penelitian ini adalah memakai teori Ansel dan Gash. sebagai acuan dalam perencanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah, namun perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti. Pada penelitiannya menerapkan di Kota Ambon Provinsi Maluku dan pada penelitian yang dilakukan oleh Ely Sulfianti hanya bersifat perencanaan dan belum mengidentifikasi di daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Rinaldo dan Amy Yayuk Sri Rahayu (2019) dalam jurnal dengan judul Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat). Penelitian ini menjelaskan mengenai proses tata kelola kolaborasi dan faktor- faktor yang mempengaruhi dalam penanganan sampah antara Masyarakat dengan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat Kelurahan adapun pendekatan penelitian yang dipakai dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh adalah tela terjadi proses kolaborasi. Kolaborasi terbentuk karena adanya kepercayaan, komitmen dan pemahaman bersama terhadap pengelolaan sampa serta didukung dengan terlihanya keberhasilan yang telah dirasakan pemangku kepentingan. Kolaborasi terjalin dengan kendala yaitu masyarakat yang belum terbiasa dalam memilah sampa namun adanya dialog untuk mencari solusi dalam penyelesaiannya. Pesamaan penelitian adalah memakai teori Ansel dan Gash sebagai pisau analisis adapun perbedaanya adalah lokus penelitian di Kota Ambon dan penelitian yang dilakkan oleh seluruh pemangku kepentingan yang bisa terlibat dalam pengelolaan sampah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Rosyadi dan Erna Lestianingrum (2013) dalam jurnal dengan judul Permodelan Sampah Pemukiman Berbasis Manajemen Kolaborasi (Studi Kasus di Desa Palimanan Barat kabupaten Cirebon). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pola kalaborasi antara pihak swasta dan masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah adapun pendekatan penelitian

yang digunakan yaitu mix method. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dalam pengelolaan sampah juga perlu dilakukannya manajemen kolaborasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan dari kolaborasi dipengaruhi oleh komitmen, kemauan berpartisipasi, sikap profesional dan keterbukaan dalam menjalankan kolaborasi. Hasil-hasil yang diperoleh dari dijalankannya kolaborasi di Desa Paliman Barat yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat melalui BUMDES, meningkatkan kapasitas institusi lokal dan kontribusi pada perbaikan lingkungan. Persamaan penelitian yaitu menggunakan konsep kolaborasi dalam melihat penyelesaian permasalahan sampah namun terdapat perbedaan yaitu pada penelitian menggunakan teori Ansel dan Gash sebagai pisau analisis melihat collaborative governance yang dibangun dan melihat kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan yang berpartisipasi .

4. Idris, Dian Herdiana, dan Iqbal Miftakhul Mujtahid (2022) Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. Dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat sehingga peran dan proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah membutuhkan sinergi dari pihak pembuat kebijakan hingga pelaksana kegiatan yang ada bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis collaborative governance dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah Di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah berjalan cukup baik yang ditilik dari Starting Condition, Collaborative Process, Facilitative Leadership dan Institutional design. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator financial yaitu masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.
5. Horas M. Panjaitan (2019) Tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah dengan mengambil studi kasus pada kota DKI Jakarta. fokus penelitian ini untuk mengkaji tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah dengan mengambil studi kasus pada kota DKI Jakarta. Kajian ini penting karena secara empiris tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah diterapkan melalui pelibatan BUMD (PT Jakpro), Swasta, Masyarakat, DPRD dan stakeholders terkait. Perumusan masalah dalam penelitian dirinci dalam beberapa pertanyaan yaitu tata kelola kolaboratif, faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung, strategi dan model desain kelembagaan tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah modern yang diharapkan dapat diterapkan di daerah pada masa yang akan datang. Fokus penelitian ini untuk mengkaji tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah dengan mengambil studi kasus pada kota DKI Jakarta. Kajian ini penting karena secara empiris tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah diterapkan melalui pelibatan BUMD (PT Jakpro), Swasta, Masyarakat, DPRD dan stakeholders terkait. Perumusan masalah dalam penelitian dirinci dalam beberapa pertanyaan yaitu tata kelola kolaboratif, faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung, strategi dan model desain kelembagaan tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah modern yang diharapkan dapat diterapkan di daerah pada masa yang akan datang. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) kesiapan kondisi awal, proses tata kelola kolaboratif, kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan dalam pengolahan sampah modern; dan 2) Pengembangan model desain organisasi kolaboratif dalam pengelolaan sampah. Dari hasil analisis ditemukan

model desain kelembagaan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan menerapkan Model MAURITS mencakup modern, authority, understanding, review, innovation process, transparency dan sustainable development goals untuk mewujudkan tujuan kolaborasi pengelolaan sampah modern di DKI Jakarta.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaannya sendiri muncul dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki beragam fokus dan juga lokus yang diteliti, berbeda dengan penelitian ini yang hanya mempunyai satu lokus yaitu Kota Ambon. Selanjutnya mengenai persamaan penelitian terdahulu dan juga penelitian ini yaitu menggunakan teori yang sama yaitu teori *Ansel and Gash* yang terdiri dari 5 dimensi yaitu *Starting condition, institutional design, facilitative leadership* dan *process collaborative*.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Tata Kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku. Kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Ambon. Yang terakhir Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Ambon dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penelitian kualitatif dirancang untuk mengkaji, menemukan, dan mendeskripsikan mutu atau kekhasan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dipaparkan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Neuman (2014) menyatakan, "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan utama untuk 'melukis gambar' menggunakan kata-kata atau angka dan menyajikan profil, klasifikasi jenis, atau garis besar langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana, dan bagaimana." Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk terjun langsung ke topik penelitian, sehingga dapat dengan jelas menemukan masalah pada lokasi penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga sumber utama: orang, tempat, dan dokumen (Simangunsong, 2017). Orang meliputi para ahli dan individu yang terlibat langsung dalam topik penelitian. Tempat mengacu pada lokasi penelitian, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan di Ambon. Dokumen mencakup buku, jurnal, peraturan, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan studi ini. Harahap (2020) menekankan pentingnya informan kunci, dengan menyatakan bahwa "informan kunci ditentukan berdasarkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam situasi sosial yang menjadi fokus penelitian."

Creswell (2014) menjelaskan bahwa peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi, atau wawancara dengan peserta. Keterlibatan ini sangat penting untuk perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan, menjadikan peneliti sebagai penentu keberhasilan studi. Sugiyono (2013) menggambarkan teknik pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang penting untuk mendapatkan data yang komprehensif dan kredibel. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan (Sugiyono, 2013). Menurut Nurdin dan Hartati (2019), tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan

fenomena secara mendalam, sehingga diperlukan pengumpulan data yang rinci dan mendalam. Penelitian ini menggunakan metode pengkodean deduktif, yang mengarahkan peneliti melalui proses pengkodean berdasarkan teori yang digunakan dalam judul penelitian, pertanyaan, definisi, dan tinjauan pustaka. Strauss dan Corbin (1990) menyarankan untuk mengkategorikan data ke dalam subkategori melalui pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif, sehingga data dapat disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan pelaporan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Tata Kelola Kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku dengan menggunakan teori *Ansel and Gash* yang memiliki 4 (empat) dimensi yaitu dimulai dengan *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain institusional), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) dan *Process collaborative* (proses kolaborasi). Adapun pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 *Starting Condition* (Kondisi awal)

Kondisi awal dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon banyak terdapat kendala dan tantangan dimulai dari sumberdaya manusia yang tidak seimbang dan juga sarana dan prasarana yang tergolong sedikit, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon jumlah pegawai dinas lingkungan hidup sebanyak 148 orang dari total tersebut hanya 52 orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang melakukan tugas di bidang pengelolaan sampah sisanya hanya sebagai honorer dengan jumlah tenaga kebersihan sebanyak tersebut, sangat jauh dari kata memadai. Begitupun dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan jauh dari kata cukup untuk melayani pengelolaan sampah untuk pengangkutan dari rumah ke rumah. Hal ini diperparah dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih memakai paradigma lama yaitu kumpul-angkut-buang. Oleh karena itu pengelolaan sampah secara kolaborasi harus didorong untuk meningkatkan penanganan sampah di Kota Ambon. Kolaborasi ini juga muncul dikarenakan pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan sampah secara sendiri. Pemotongan anggaran satgas kebersihan di karenakan covid-19 menjadi salah satu penyebab terjadi kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku.

3.2 *Institutional Design* (Desain Institusional)

Institusional atau kelembagaan merupakan unsur-unsur yang secara terorganisasi saling berkaitan dalam hal ini meliputi baik dari unsur pemerintah, swasta, dan juga masyarakat umum. Di kota Ambon sendiri khususnya pada kecamatan Sirimau telah dibentuk KSM atau yang lebih di kenal dengan Kelompok Swadaya Masyarakat untuk membantu Pemerintah untuk mengelola sampah terkhususnya pada kecamatan Sirimau. Pada desain institusional diharapkan partisipasi forum dari setiap komponen dengan adanya keterlibatan dalam penyusunan, pembentukan, dan kepengurusan KSM ini baik dari tokoh masyarakat, stakeholder internal kecamatan, dan stakeholder eksternal. Dan pembentukan Bank sampah yang berperan dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat. Keberadaan forum ini telah diatur berdasarkan regulasi yang telah dibuat yaitu melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Nomor 14/2019 Tentang Pembentukan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Bank Sampah. Lain halnya dengan aturan dasar yang mengikat penyelenggaraan Kelompok Swadaya Masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang yang pembentukan tim kerjanya berdasarkan Surat Keputusan Camat Sirimau Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah. Akan tetapi yang menjadi kekurangan yaitu tidak ada layanan pengaduan secara

online untuk masyarakat mengadukan permasalahan mengenai KSM ini.

3.3 *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dengan Camat Sirimau menunjukkan pemahamannya secara penuh mengenai pengelolaan sampah secara kolaborasi hal ini ditunjukkan dengan program-program yang dibuat dengan menunjukkan dan melibatkan pemangku kepentingan lain. Contoh program yang telah teralisasi yaitu kegiatan jumat bersih dimana masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan kepemimpinan fasilitatif dengan pemangku kepentingan lainnya juga berusaha membangun hubungan kekeluargaan antara pemerintah dan pemerintah serta pemerintah dengan masyarakat. Kepemimpinan fasilitatif yang baik adalah kepemimpinan yang terbuka untuk menerima kritikan dari masyarakat sehingga masyarakat memiliki rasa kedekatan anatara pemimpin dengan masyarakat. Pemimpin yang menghormati dan menghargai pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan mendukung jalannya proses kolaborasi dan pemerintahan.

3.4 *Process Collaboration* (Proses Kolaborasi)

a. Dialog Tatap Muka

Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon melakukan pertemuan langsung dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengedukasi mereka mengenai pengelolaan sampah dan pelestarian ruang terbuka hijau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, seperti yang dilaporkan oleh beritabersatu.com dengan judul "Pemerintah Sosialisasikan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Titik Pantau Adipura", kegiatan ini melibatkan sosialisasi kepada camat, lurah, kepala sekolah, unit-unit bank sa

mpah, dan berbagai organisasi perangkat daerah. Di Kecamatan Sirimau, pemerintah juga menggelar rapat dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui dialog tatap muka ini, terjalinlah kepercayaan antara para pemangku kepentingan. Pertemuan ini memungkinkan para pihak untuk saling berbagi pemahaman mengenai tantangan dan keterbatasan yang mereka hadapi dalam hal pengelolaan sampah.

b. Membangun Kepercayaan

Dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Ambon melalui collaborative governance, upaya untuk membangun kepercayaan dilakukan dengan menghargai peran dan wewenang setiap pemangku kepentingan. Transparansi dalam pengelolaan sampah, terutama dalam hal pembayaran retribusi, juga sangat ditekankan. Kepercayaan dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang menjadi mitra dalam pengelolaan sampah juga merupakan hal yang penting untuk dibangun.

c. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses diwujudkan dengan adanya AD-ART kelompok swadaya masyarakat. Berdasarkan Anggaran Dasar-Rumah Tangga menjadi komitmen setiap pengurus dan anggota bahwa memanfaatkan dan memelihara sarana penyehatan lingkungan, terutama dalam hal fasilitas kebersihan lingkungan, pembelajaran bersama, dan pengembangan gaya hidup yang sehat, setiap rumah tangga yang menggunakan sarana tersebut diwajibkan membayar iuran bulanan sebesar Rp. 25.000. Pembayaran iuran dilakukan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya. Pengangkutan sampah dilakukan sebanyak 3 kali seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Namun, komitmen terkait hal ini masih belum jelas, sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara pengurus KSM dengan pihak pemerintah, termasuk kelurahan, kecamatan, dan dinas lingkungan hidup.

d. Pemahaman Bersama

Pada beberapa tahap dalam proses kolaboratif, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama apa yang mereka dapat capai bersama. Tujuan pembentukan KSM. Tujuan Jangka Pendek: terbentuknya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sampah melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) pada Kecamatan Sirimau. Telah terbentuknya KSM di beberapa kelurahan yaitu KSM. Tujuan Jangka Menengah: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) pada delapan kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang. Tujuan Jangka Panjang: Terwujudnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sampah oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Kecamatan Sirimau.

e. Hasil Sementara

Hasil yang ingin dicapai dalam jangka pendek adalah keinginan bersama untuk memiliki wilayah yang bersih dan bebas dari sampah dalam pengelolaan sampah. Tujuan Jangka Pendeknya adalah membentuk kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sampah melalui KSM di beberapa kelurahan di Kecamatan Sirimau, Saat ini, pengelolaan sampah masih terbatas pada tahap pengangkutan karena adanya kendala terkait sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh KSM, serta luas wilayah dan beban kerja yang besar.

Tujuan Jangka Menengahnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui KSM di delapan kelurahan di Kecamatan Sirimau. Namun, hal ini masih belum terwujud sepenuhnya karena hanya tiga kelurahan yang sampahnya diangkut, sementara penanganan sampah masih mengikuti paradigma lama yaitu kumpul, angkut, dan buang. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan sampah dari rumah tangga.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku telah berjalan, meskipun belum optimal. Salah satu solusi yang diadopsi adalah pembentukan forum seperti Kelompok Swadaya Masyarakat dan Bank Sampah, sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Ambon dengan menerapkan prinsip kolaborasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah secara kolaboratif mampu menggerakkan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menghadapi masalah ini, seperti yang terlihat dalam pembentukan "Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah, Kelola Sampah untuk Kebersihan Lingkungan Bersama Kelompok Swadaya Masyarakat", melibatkan Pemerintah Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, masyarakat umum, serta

pihak-pihak lain yang terlibat. Temuan lain, seperti yang diungkapkan oleh Sufiyanti (2011), menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis kolaborasi dapat berhasil dengan melibatkan semua stakeholder untuk bertanggung jawab secara kolektif dalam menangani permasalahan sampah. Keberhasilan ini tergantung pada kepemimpinan fasilitatif yang menjadi penggerak utama, serta komitmen, keterbukaan, dan dialog tatap muka sebagai kunci penting keberhasilan, sebagaimana juga ditemukan oleh Rosyadi dan Lestianingrum (2013). Namun, ada kekurangan yang perlu diatasi, seperti minimnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah secara holistik, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Masih ada kecenderungan membuang sampah secara sembarangan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk mengadakan pertemuan tatap muka secara intens dan berkelanjutan, sebagaimana yang direkomendasikan oleh penelitian Edwin Rinaldo dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Mereka menunjukkan bahwa kolaborasi terbentuk atas dasar kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama terhadap pengelolaan sampah, dan dapat mengatasi kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Melalui dialog tatap muka yang intens, pemangku kepentingan dapat duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi bersama untuk menangani permasalahan ini

4.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa faktor yang mendukung terlaksananya kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku adalah peran penting dari kepemimpinan fasilitatif, seperti yang ditunjukkan oleh Camat Sirimau. Inisiatif, ide, dan gagasan yang diperkenalkan, serta keterlibatan langsung dalam komunitas, menjadi kunci utama dalam mewujudkan kolaborasi efektif dalam pengelolaan sampah. Ke depannya, diharapkan kecamatan lain di Kota Ambon juga dapat mengadopsi pendekatan pengelolaan sampah secara kolaboratif ini.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku telah terbentuk, meskipun belum optimal. Upaya dimulai dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah sebagai langkah awal kolaborasi, dengan pembuatan nota kesepahaman bersama stakeholders. Tahap berikutnya melibatkan pendirian lembaga pengelolaan sampah, yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Konsistensi dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba kebersihan. Road map yang jelas ditetapkan dengan target-tahapan untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Peran Camat sebagai pimpinan daerah menjadi motor penggerak yang memahami esensi pengelolaan sampah, meskipun masih terdapat kendala seperti minimnya partisipasi dari sektor swasta dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah. Diperlukan pembinaan yang berkelanjutan mengenai pengelolaan sampah dan perlu memperjelas komitmen terkait pembagian wilayah serta percepatan penanganan sampah dari rumah ke Tempat Pengumpulan Sampah (TPS). Kelompok Swadaya Masyarakat memiliki peran yang terbatas hanya dalam pengangkutan sampah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya berfokus pada Kecamatan Sirimau dikarenakan memiliki kolaborasi dalam pengelolaan sampah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Sirimau dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Damhuri, E., & Padi, T. (2010). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. ITB Press.

Green Molucass. (2022). *Bank Sampah Kota Ambon: Transformasi Sampah Menjadi Sesuatu yang Bernilai*. Diakses dari <https://www.greenmolucass.org>

Harahap, R. (2020). Peran Informan Kunci dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian Sosial*, 8(1), 45-55.

Islamy, M. (2018). Implementasi Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 1-10.

Max Weber. (2008). Birokrasi: Pandangan Max Weber. Dalam Prasojo, E., & Kurniawan, T. (Eds.), *Good Governance: Konsep dan Penerapan* (hlm. 32-45). PT Gramedia.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.

Nurdin, H., & Hartati, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit DEF.

Rizaty, M. A. (2021). Mayoritas Sampah di Jakarta Berasal dari Rumah Tangga pada 2020. In *Databooks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/mayoritas-sampah-nasional-dari-aktivitas-rumah-tangga-pada-2020>Saldana, J. (2015). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Sejati. (2004). *Pengelolaan Sampah*.

- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit ABC.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Sage Publications.
- Thomas, C. W., & Perry, J. L. (2006). Collaborative Governance: Managing for Performance. *Public Performance & Management Review*, 30(1), 34-52.
- Idris, D., Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. *Jurnal Tata Kelola*, 8(2), 112-125. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/3269/2624>
- Panjaitan, H. M. (2019). Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Sampah dengan Mengambil Studi Kasus pada Kota DKI Jakarta. *Jurnal Tata Kelola Lingkungan*, 10(4), 300-315. <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/222>
- Rinaldo, E., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat). *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 11(1), 45-58. https://www.researchgate.net/publication/334728959_Penanganan_Sampah_Secara_Kolaboratif_antara_Masyarakat_dan_Petugas_Penanganan_Prasarana_dan_Sarana_Umum_PPSU_Tingkat_Kelurahan_Kasus_Penanganan_Sampah_di_Kelurahan_Jembatan_Lima_Kecamatan_Tambora_Kota/fulltext/5d3cf2954585153e5927649b/Penanganan-Sampah-Secara-Kolaboratif-antara-Masyarakat-dan-Petugas-Penanganan-Prasarana-dan-Sarana-Umum-PPSU-Tingkat-Kelurahan-Kasus-Penanganan-Sampah-di-Kelurahan-Jembatan-Lima-Kecamatan-Tambora-Kota.pdf
- Rosyadi, S., & Lestianingrum, E. (2013). Permodelan Sampah Pemukiman Berbasis Manajemen Kolaborasi (Studi Kasus di Desa Palimanan Barat Kabupaten Cirebon). *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 7(3), 200-215. <https://www.neliti.com/id/publications/115964/permodelan-sampah-pemukiman-berbasis-manajemen-kolaborasistudi-kasus-di-desa-pal>
- Sulfianti, E. (2011). Perencanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan*, 5(2), 123-135. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/294>